

**Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Brebes Tahun 2017
(Studi Komunikasi Politik Tentang Perilaku Pemilih
di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)**

*Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Brebes Tahun 2017
(Studi Komunikasi Politik Tentang Perilaku Pemilih
di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)*

Diryo Suparto
Sarwo Edy
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Halmahera no.1 Kota Tegal
suparto.diryo@gmail.com

Abstract

Community participation in the regional head elections is an act of choosing leaders who can lead well the region. The tendency to elect one of the candidates in a regional head election is formed by a voting behavior that has been established from the family and surrounding communities. This study aims to determine the behavior of the people of Songgom Sub-District on the election agenda in Brebes District. Based on the purpose of the research, the research method used is descriptive qualitative research method..

Keywords: The regional head elections, Community participation, Voter behavior

Abstraksi

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan suatu tindakan memilih pemimpin yang dapat memimpin dengan baik daerahnya. Kecenderungan untuk memilih salah satu kandidat dalam pemilihan umum kepala daerah terbentuk oleh suatu perilaku pemilih yang telah dibentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat Kecamatan Songgom dalam agenda pemilihan umum di Kabupaten Brebes. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Pemilihan umum kepala daerah, Partisipasi masyarakat, Perilaku pemilih

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi adalah prinsip bangsa atau negara ini dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi di Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD '45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua anggota masyarakat yang memenuhi syarat diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu.

Salah satu perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hal, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah provinsi, maupun kabupaten/kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di

provinsi, maupun kabupaten/ kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Pasal 40 UU No. 32/2004).

Sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/ Pilkada). Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" atau "Pemilukada".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Khusus di Kabupaten Brebes, Pilkada Bupati Brebes 2017 dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Brebes periode 2017-2022, serta KPUD Brebes telah menetapkan dua pasang kandidat peserta Pilkada Brebes 2017. Pada 25 Oktober 2016, KPUD telah mengundi nomor urut peserta Pilkada Brebes.

Pasangan nomor urut 1 adalah pasangan DR.H. Suswono dan Ahmad Mustaqim yang diusung oleh PKS dan Gerindra. Pasangan ini mendaftar pada Jumat tanggal 23 September 2016, pukul, 16.00 WIB. Data perolehan kursi di DPRD Kabupaten Brebes yang dihimpun kabarberitaku.com, PKS dan Gerindra yang mengusung Suswono - Musttaqin memiliki 11 kursi di DPRD Brebes dengan rincian enam kursi PKS dan lima kursi Gerindra.

Pasangan nomor urut 2 adalah pasangan Hj. Idza Priyanti dan Narjo yang diusung oleh Partai PDIP, dan enam pengusung lainnya yakni, Partai Golkar, PPP, PKB, Partai Demokrat, PAN dan Partai Hanura. Pasangan ini mendaftar pada Rabu (21/9/2016). Partai pengusung Idza - Narjo memiliki 39 kursi dengan rincian PDI Perjuangan 11 kursi, PKB 8 kursi, Golkar 7 kursi, PAN 5 kursi, Demokrat 4 kursi, PPP 3 kursi dan Hanura 1 kursi.

Sementara itu, salah satu indikator majunya demokrasi di suatu wilayah adalah adanya pemilihan umum yang jujur dan adil dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan suaranya

secara langsung pada pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif atau pemilihan presiden.

Pemilu atau Pilkada yang selama ini berlangsung di Kabupaten Brebes membawa catatan sendiri, terutama pada partisipasi pemilih yang berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPU atau KPUD Brebes.

Partisipasi politik tersebut antara lain berbentuk penunaian hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum. Hal tersebut mencerminkan tingkat kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, dapat pula memberikan legalitas atas kondisi sosial politik dan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kabupaten Brebes adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 1.902,37 km², jumlah penduduknya sekitar 1.732.719 jiwa (2010). Ibukotanya ada di Kecamatan Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas di Jawa Tengah ke-2 setelah Kabupaten Cilacap. Penduduknya banyak bekerja disektor pertanian, kelautan dan perikanan, disamping itu banyak warga Brebes yang merantau.

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Brebes masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penyebab rendahnya partisipasi pemilih karena banyaknya warga setempat yang menjadi urban, para nelayan yang memilih melaut, apatisme warga terhadap pelaksanaan pemilu atau pilkada.

Kabupaten Brebes dalam hal ini KPUD Brebes menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan kepada daerah atau Pilkada serentak 2017 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Februari 2017. Masyarakat Brebes yang berhak untuk memilih telah melakukan pencoblosan secara langsung pada masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), setelah itu dilakukan penghitungan surat suara secara manual pada siang harinya. Yang disaksikan langsung oleh para saksi dan panitia penyelenggara di tiap TPS, serta dari seluruh hasil penghitungan dikirim ke KPUD untuk dilaksanakan rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara. Hasil akhir dari semua inilah yang merupakan perolehan yang sah oleh KPUD dan akan menjadi penentu terhadap siapa pemenang pilkada di wilayahnya masing-masing.

Dari hasil hitung cepat/Quick Count pasangan petahana, Izha-Narjo mengungguli perolehan suara sebesar 67,9 persen, sedangkan pasangan DR. H. Suswono – Ahmad Mustaqqim hanya meraih suara sebesar 32,09 persen.

Namun dari hasil itu semua, terdapat permasalahan yang sangat serius yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Brebes, tergolong rendah. Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten menunjukkan partisipasi pemilih hanya 55,4 persen. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Brebes mencapai 1.522.560 orang. Jika ditambah data jumlah pemilih tambahan, maka jumlah pemilih di Brebes mencapai 1.531.813. Pada

Pilkada 15 Februari lalu, hanya ada 838.167, yang menyalurkan hak pilih. Artinya ada 693.646 atau sekitar 44 persen warga yang tidak mencoblos. Jumlah itu jauh di bawah target KPU yang mencapai 76 persen.

Berdasarkan data di KPU Kabupaten Brebes, rata-rata kehadiran pemilih tertinggi kecamatan ada di Kecamatan Salem yang mencapai 76,31 persen. Sedangkan untuk tingkat desa, kehadiran tertinggi ada di Desa Kadumanis, Kecamatan Salem yang mencapai 88,56 persen. Untuk rata-rata kehadiran terendah di Kecamatan Songgom yang hanya 58,46 persen. Dan desa dengan tingkat kehadiran paling rendah ada di Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes yang hanya 37,12 persen. Khusus untuk Pilkada 2017 ini, daerah paling rendah tingkat partisipasinya yaitu Kecamatan Songgom. Jumlah partisipasi pemilih di kecamatan tersebut hanya 31.793 dari total jumlah pemilih 69.705 atau 45,6 persen.

Menurut Ketua KPUD Brebes Muamar Riza Pahlevi, pihaknya telah melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu melakukan sosialisai dengan cara menggelar festival Rebana di Alun-alun Brebes, sosialisasi di Lapas, dan yang gencar dilakukan yaitu selain ke pelosok-pelosok daerah yang warganya merantau ke berbagai daerah di Indonesia, juga melalui medsos seperti Facebook, khususnya warga Brebes yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal ini dilakukan berdasarkan data yang diketahui ada sekitar 40 ribu warga Brebes

yang menjadi TKI diluar negeri yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pendidikan dan jenis pekerjaan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana pemahaman/ pengetahuan masyarakat tentang Pilkada?
3. Apa penyebab masyarakat Kecamatan Songgom tidak berpartisipasi di Pilkada serentak 2017?
4. Bagaimana harapan masyarakat untuk Pilkada/ Pemilu selanjutnya supaya sukses dan lancar?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data, fakta dan keadaan atau kecenderungan yang ada, dengan kata lain tidak untuk menguji hipotesis. Oleh karena itu, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu berusaha memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual melalui pengumpulan data, penyusunan data yang akhirnya dijelaskan dan dianalisis.

Pendekatan deskriptif dipilih karena dapat: (1) mengidentifikasi, mendeskripsi dan menganalisis kondisi subjek di lokasi penelitian; (2) menggambarkan dan menafsirkan data

yang telah diperoleh di lapangan baik berkaitan dengan antar-data maupun kecenderungan pengembangannya; dan (3) memecahkan permasalahan aktual melalui data yang telah dikumpulkan, disusun, dan dianalisis.

Populasi penelitian ini adalah seluruh adalah anggota masyarakat kecamatan Songgom yang terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPUD Brebes. Sedangkan penunjukkan subyek sampel sebagai responden penelitian ditentukan secara acak.

Untuk pengumpulan data dilakukan wawancara, Wawancara dalam rangka pengumpulan data penelitian ini dilakukan secara terus menerus dengan responden dalam berbagai situasi, meskipun kadangkala dilakukan pula dalam situasi yang khusus. Pelaksanaan wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang memadai sehubungan dengan pokok masalah penelitian yang telah diidentifikasi.

Selain menggunakan wawancara, pengumpulan data penelitian ini menggunakan pula studi dokumen, sebagai sumber data yang dapat dijadikan bahan triangulasi untuk melakukan pengecekan kesesuaian data. Dalam hal ini adalah data dari KPUD Kabupaten Brebes.

Sedangkan untuk alat pengumpulan data, angket merupakan teknik sekaligus instrumen pengumpulan data yang memuat daftar pertanyaan terperinci dan lengkap serta berisi

pertanyaan tentang fakta-fakta yang dianggap dikuasai oleh responden.

Data yang telah terkumpul melalui angket, dianalisis menggunakan teknik statistika deskriptif. Terhadap data kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi, dianalisis dengan pemaknaan deskriptif.

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang ada di KPUD Kabupaten Brebes, terdapat permasalahan yang sangat serius yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Brebes, tergolong rendah. Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten menunjukkan partisipasi pemilih hanya 55,4 persen. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Brebes mencapai 1.522.560 orang. Jika ditambah data jumlah pemilih tambahan, maka jumlah pemilih di Brebes mencapai 1.531.813. Pada Pilkada 15 Februari lalu, hanya ada 838.167, yang menyalurkan hak pilih. Artinya ada 693.646 atau sekitar 44 persen warga yang tidak mencoblos. Jumlah itu jauh di bawah target KPU yang mencapai 76 persen.

Rata-rata kehadiran pemilih tertinggi kecamatan ada di Kecamatan Salem yang mencapai 76,31 persen. Sedangkan untuk tingkat desa, kehadiran tertinggi ada di Desa Kadumanis, Kecamatan Salem yang mencapai 88,56 persen. Untuk rata-rata kehadiran terendah di Kecamatan Songgom yang hanya 58,46

persen. Dan desa dengan tingkat kehadiran paling rendah ada di Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes yang hanya 37,12 persen. Khusus untuk Pilkada 2017 ini, daerah paling rendah tingkat partisipasinya yaitu Kecamatan Songgom. Jumlah partisipasi pemilih di kecamatan tersebut hanya 31.793 dari total jumlah pemilih 69.705 atau 45,6 persen.

Dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan secara acak kepada warga Kecamatan Songgom sebanyak 70 responden dengan teknik wawancara, maka didapat temuan sebagai berikut.

Menjawab rumusan masalah pertama terkait pendidikan dan jenis pekerjaan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Brebes. Dari hasil jawaban kuesioner, sebanyak tujuh responden menjawab tidak sekolah, 22 responden menjawab SD, 23 responden menjawab SMP, 13 responden menjawab SMA, tiga responden menjawab D3, dan dua responden menjawab S1. Pertanyaan selanjutnya tentang pekerjaan, sebanyak 15 responden menjawab petani/buruh tani, 15 responden menjawab karyawan, lima responden menjawab TKI/merantau, dua reponden menjawab guru, tiga responden menjawab perawat/ dokter/ bidan, tiga responden menjawab pensiunan, tujuh responden menjawab wiraswasta, lima responden pelajar/mahasiswa, dua responden menjawab seniman, 13 responden menjawab ibu rumah tangga/tidak bekerja. Dari hasil data tersebut dan dikomparasikan dengan pertanyaan lainnya ternyata latar belakang pendidikan serta pekerjaan tidak

mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Brebes terutama dalam hal ini kecamatan Songgom.

Menjawab rumusan masalah kedua terkait pemahaman / pengetahuan masyarakat tentang Pilkada. Dari pertanyaan pengetahuan masyarakat bahwa tanggal 15 februari 2017 dilaksanakan Pilkada di Kabupaten Brebes, sebanyak 70 atau semua responden menjawab tahu. Ini artinya bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Brebes terutama dalam hal ini Kecamatan Songgom mengetahui tanggal pelaksanaan Pilkada yang telah ditentukan oleh KPUD Kabupaten Brebes. Hasil jawaban dari pertanyaan selanjutnya terkait pemahaman masyarakat tentang makna partisipasi politik, sebanyak 41 responden menjawab ya sedangkan sisanya sebanyak 29 responden menjawab tidak. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan latar belakang pendidikan. Berikutnya hasil jawaban dari pertanyaan terkait sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Brebes sudah cukup memberikan informasi kepada masyarakat, sebanyak 53 responden menjawab sudah sedangkan sisanya sebanyak 17 responden menjawab belum. Dari hasil jawaban pertanyaan ini, sebaiknya KPUD Kabupaten Brebes mereview serta merancang lagi bentuk sosialisasi yang akan dilakukan di Pemilu maupun Pilkada selanjutnya. Kemudian hasil jawaban dari pertanyaan terkait publik figur yang dimintai pendapat mengenai permasalahan politik dalam Pilkada, sebanyak delapan responden menjawab perangkat desa, 10 responden menjawab ketua RW/RT, lima

responden menjawab pengurus partai, sembilan responden menjawab guru, tujuh responden menjawab mahasiswa, 11 responden menjawab tokoh agama, dua responden menjawab Polri/TNI, sedangkan 18 responden menjawab tidak ada. Ini memberikan gambaran bahwa warga antusias menghadapi Pemilu/ Pilkada.

Menjawab rumusan masalah penyebab masyarakat Kecamatan Songgom tidak berpartisipasi di Pilkada serentak 2017 Kabupaten Brebes. Dari pertanyaan mengenai jangkauan tempat pemungutan suara (TPS), sebanyak 68 responden menjawab mudah/TPS dekat dengan rumah, sedangkan dua responden menjawab susah/TPS jauh dari rumah. Jadi untuk TPS tidak ada masalah, hampir semua responden dapat menjangkau TPS yang telah disediakan oleh KPUD Kabupaten Brebes. Selanjutnya dari pertanyaan mengenai partisipasi responden (nyoblos/tidak), sebanyak 56 responden menjawab ya sedangkan 14 responden menjawab tidak alias golput. Untuk 56 responden yang menjawab nyoblos pada saat Pilkada, mereka semua rata-rata mengatakan bahwa warga Kabupaten Brebes khususnya Kecamatan Songgom yang pada saat pencoblosan dapat dipastikan hadir di TPS untuk memilih pilihan mereka, apalagi ada kader dari salah satu partai politik besar yang maju pada Pemilu maupun Pilkada. Hal ini dikarenakan Kabupaten Brebes merupakan basis dari partai politik tersebut. Sedangkan responden yang menjawab tidak nyoblos alias golput, tim peneliti

secara kebetulan mendapati mereka yang pada saat pencoblosan / Pilkada sedang di perantauan baik diluar kota maupun diluar negeri (TKI) mengatakan bahwa hal ini sudah terbiasa terjadi di Kabupaten Brebes. Mereka juga mengatakan alasan serta argumentasinya bahwa jikalau mereka harus pulang hanya untuk mencoblos, mereka memperhitungkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Mereka sebenarnya paham betul akan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia, maka dari itu mereka ingin diberi solusi yang terbaik. Kemudian hasil jawaban dari pertanyaan mengenai alasan tidak nyoblos alais golput, sebanyak tujuh responden menjawab sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, dua responden menjawab TPS jauh, dan lima responden menjawab pada saat Pilkada masih diperantauan (luar kota/luar negri). Hal ini diperkuat oleh Ketua KPUD Kabupaten Brebes, Muamar Riza pahlevi, mengatakan salah satu faktor rendahnya partisipasi pemilih yaitu banyaknya perantau yang tidak pulang kampung saat hari pencoblosan.

Menjawab rumusan masalah yang terakhir yaitu harapan masyarakat untuk Pemilu atau Pilkada selanjutnya supaya sukses dan lancar. Sebanyak 20 responden menjawab tidak tahu, 27 responden menjawab sosialisasi, mereka berharap KPUD Kabupaten Brebes lebih meningkatkan sosialisasi yang tepat sasaran, hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Brebes khususnya dalam hal ini Kecamatan Songgom sangat luas. Dan 23 responden menjawab buat terobosan / solusi baru. Responden

ini menginginkan terobosan/ solusi baru guna mengatasi permasalahan warga yang merantau baik diluar kota maupun diluar negeri (TKI).

IV. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Brebes merupakan elemen dasar dari sebuah rezim demokrasi. Dukungan masyarakat dalam Pilkada merupakan sejatinya demokrasi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam Pilkada, maka tidak akan ada demokrasi apalagi pemerintahan yang demokratis. Pilkada merupakan bentuk partisipasi dalam pemilu yang paling elementar. Meski demikian, indikator tinggi rendahnya partisipasi politik ditentukan oleh seberapa banyak warga masyarakat ke tempat pemungutan suara (TPS).

Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Brebes terutama di Kecamatan Songgom secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat masih kurang dalam memberikan partisipasi politiknya.

Angka golput di Kecamatan Songgom masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 54,4%. Alasan terbesar masyarakat Kecamatan Songgom yang mengambil sikap golput antara lain adalah sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, dan pada saat Pilkada banyak pemilih masih diperantauan (luar kota/ luar negeri).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Asfar. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Pustaka Eureka.
- Ramlan Surbakti. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas.
- Data KPUD Kabupaten Brebes